

DAFTAR BACAAN

Buku-Buku

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Setjoatmadja, Sylvia, *Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perkara (Pendekatan Keadilan Restoratif)*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2021.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022.

Jurnal Hukum

- Hanik, U., Peran SP2DK dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak: Studi di KPP Pratama Malang Utara, *Journal of Public and Business Accounting* 5, No. 2: 52–57, 2024. <https://doi.org/10.31328/jopba.v5i2.406>
- Herman, H., dan Muin, F., Sistematis Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, No. 2: 89, 2018. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15445>
- Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., dan Kasman, Efektivitas SP2DK terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 2, No. 1: 45–56, 2020.
- Rivani, S., dan Cheisviyanny, C., Respon Wajib Pajak terhadap SP2DK, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5, No. 2: 1–15, 2023.
- Silitonga, G. F., *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Kedudukan Surat Edaran Dalam Perundang-undangan*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.

Media Daring

MUC Consulting, PMK 111/2025 on SP2DK Providing Legal Certainty in Tax Supervision, 2026. [Diakses] <https://muc.co.id/en/article/pmk-1112025-on-sp2dk-providing-legal-certainty-in-tax-supervision>

Ortax, DJP Atur Ulang Pengawasan Wajib Pajak Melalui PMK 111/2025, 2026. [Diakses] <https://ortax.org/djp-atur-ulang-pengawasan-wajib-pajak-melalui-pmk-111-2025>

Pajakku, Skema Baru Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Sesuai PMK 111/2025, Artikel Pajakku, 2026. [Diakses] <https://artikel.pajakku.com/skema-baru-pengawasan-kepatuhan-wajib-pajak-sesuai-pmk-1112025>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2020 tentang Penyesuaian Prosedur Operasional Sehubungan dengan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2020 tentang Tata Cara Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan Penjaminan Kualitas Data dalam Rangka Perluasan Basis Data.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2021 tentang Implementasi Compliance Risk Management dan Business Intelligence.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.